BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran merupakan sebuah proses atau cara yang menjadikan manusia untuk mau belajar, yang didalamnya terjadi suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar. Pembelajaran adalah suatu cara memberikan ilmu pengetahuan untuk peserta didik yang kurang berkembang dan serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dalam dunia pendidikan terdapat proses pembelajaran yang dituntut untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat karena pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Secara spesifik tujuan Pembangunan Nasional pada sektor pendidikan dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa :

> "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan dalam makna yang umum dapat diartikan sebagai komunikasi terorganisir dan berkelanjutan yang disusun untuk menumbuhkan kegiatan belajar. Dari batasan tersebut maka jelaslah bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya kegiatan terorganisir yang dilakukan di sekolah sebagaimana banyak pihak yang beranggapan demikian, akan tetapi dalam makna wajar sebagaimana dijelaskan oleh Sudjana (2004, hlm.3) bahwa "Pendidikan mencakup semua komunikasi yang terorganisir dan berkelanjutan yang diselenggarakan dalam kehidupan nyata di masyarakat, lingkungan keluarga, lembaga-lembaga, dunia kerja dan lingkungan kehidupan lainnya".

Oleh karena itu pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki akhlak

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional memiliki tiga subsistem pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang di selenggarakan di sekolah sedangkan pendidikan nonformal dan pendidikan informal berada dalam cakupan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu pemerintah sangat berperan dalam peningkatan pendidikan melalui pendidikan non formal. Seperti dijelaskan dalam definisi dan fungsi dari pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu :

> "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai *pengganti, penambah dan/atau pelengkap* pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan kepribadian professional".

Pendidikan non formal sangat erat kaitannya dengan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal atau pendidikan persekolahan. Dalam mengantisipasi rendahnya pendidikan formal dari masyarakat, maka pendidikan non formal diarahkan pada penguasaan keterampilan bagi warga belajarnya. Melalui satuan pendidikan non formal yaitu Kursus yang dibina Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI, Depdiknas RI pada tahun 2006 meluncurkan program Kursus Wirausaha Desa (KWD) yang penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga-lembaga kursus yang ada di lingkup daerah Tingkat II Kabupaten serta program KWK (Kursus Wirausaha Kota) yang pelaksanannya diselenggarakan kepada lembaga kursus yang ada diwilayah perkotaan. Pada tahun 2010 meluncurkan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang penyelenggaraanya diserahkan kepada lembaga-lembaga kursus yang ada di lingkup daerah Kabupaten/Kota termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa :

> "Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembang-kan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu kursus dan pelatihan bukan sekedar memberikan keterampilan untuk mencari pekerjaan tetapi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja".

Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal (PAUDNI) yang salah satunya adalah program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) bidang kursus. Melalui program kursus diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi tenaga kerja yang siap pakai atau bisa usaha mandiri (Berwirausaha). Kursus merupakan salah satu dari sekian banyak satuan PAUDNI yang hingga saat ini masih dianggap sebagai suatu wadah yang ampuh dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Roni Artasasmita (1985, hlm.9) bahwa " Pendidikan non-formal melalui jalur kursus dan latihan dapat dijadikan salah satu senjata ampuh untuk memerangi kemiskinan yang melanda masyarakat pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang ".

Berbicara mengenai kursus sebagai satuan dari pendidikan non-formal telah tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 5, berbunyi:

> "Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi".

Menurut (Juknis PKM, 2013,Hlm.4) kursus artinya adalah pembekalan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup yang diselenggarakan pada kursus dan pelatihan (pendidikan nonformal) selain untuk mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan pengembangan profesi, juga untuk membantu peserta didik dapat berwirausaha atau membuka usaha mandiri di setiap unit usaha. Selanjutnya menurut Roni Artasasmita (1985,Hlm.10) mendefinisikan bahwa "Kursus" adalah sebagai suatu kegiatan pendidikan yang berlangsung dalam masyarkat yang dilakukan dengan sengaja, terorganisir dan sistematik untuk memberikan suatu mata pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau dalam waktu yang relatif singkat, agar mereka

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakatnya". Sedangkan menurut (Juknis PKM, 2013,Hlm.2) pengertian "Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat".

Dari pengertian di atas, maka kursus dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang berlangsung di masyarakat yang dilakukan dengan sengaja, terorganisir dan sistematis untuk memberikan suatu rangkaian pelajaran tertentu kepada sasaran didik (warga belajar) dalam waktu yang relatif singkat, agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai atau bisa usaha mandiri. Adapun bentuk nyata dari penyelenggaraan kursus adalah kursus keterampilan tata kecantikan rambut di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tasikmalaya yang diperuntukan bagi semua masyarakat termasuk generasi muda yang mau dan berkeinginan untuk membekali dirinya dengan keterampilan fungsional tersebut sebagai bekal kemandirian untuk berwirausaha, karena seorang yang memiliki jiwa wirausaha selalu menciptakan peluang yang dapat mengembangkan diri dalam lingkungannya. Penciptaan peluang tersebut tumbuh dan berkembang dari sifat dan kepribadian setiap individu. Akan tetapi berdasarkan hasil studi pendahuluan penulis beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran hanya terfokus kepada pelatihan PKM bidang kursus tata kecantikan rambut dan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan kepada warga belajar tentang pengetahuan berwirausaha sehingga masih banyaknya peserta didik yang merasa kebingungan hal itu bukan kepada keterampilan akan tetapi lebih kepada mengaplikasikan keterampilan berwirausaha. Dapat dikatakan bahwa 60% peserta pelatihan dari 20 orang peserta pelatihan masih belum sepenuhnya dapat menyerap semua proses pembelajaran yang diajarkan oleh pamong, sehingga peserta pelatihan merasa belum percaya diri terhadap keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan. Hal itu membuat peserta

pelatihan bidang kursus tata kecantikan rambut tahun 2013/2014 belum menerapkan hasil belajar bagi kemandirian untuk berwirausaha.

Terkait hal di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang memanfaatkan hasil belajar pada kursus tata kecantikan rambut bagi kemandirian lulusan program PKM SKB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013/2014 untuk berwirausaha, dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya, sehingga mereka dapat membuka lapangan kerja atau usaha mandiri yang dituangkan dalam judul Skripsi, yaitu "**Proses Pembelajaran Program PKM Bidang Tata Kecantikan Rambut Bagi Kemandirian Berwirausaha Warga Belajar** (*Study Deskriptif Pada Program PKM Tahun 2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya)*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa masalah yang telah teridentifikasi, diantaranya :

1. Pelaksanaan pembelajaran hanya terfokus kepada pelatihan PKM bidang kursus tata kecantikan rambut dan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan kepada warga belajar tentang pengetahuan berwirausaha.
2. 60% peserta pelatihan dari 20 orang peserta pelatihan masih belum sepenuhnya dapat menyerap semua proses pembelajaran yang diajarkan oleh pamong sehingga peserta pelatihan merasa belum percaya diri terhadap keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
3. Lebih dari setengah lulusan (60%) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dari 20 orang peserta pelatihan bidang kursus tata kecantikan rambut tahun 2013/2014 belum menerapkan hasil belajar bagi kemandirian untuk berwirausaha.
4. Masih banyak warga belajar yang merasa ragu setelah mengikuti pelatihan, hal itu bukan kepada keterampilan akan tetapi lebih kepada mengaplikasikan keterampilan berwirausaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : "Proses Pembelajaran Program Pkm Bidang Tata Rias Kecantikan Rambut Dalam Meningkatkan

Kemandirian Berwirausaha Bagi Warga Belajar Di UPTD SKB Kabupaten Tasimalaya". Dari rumusan masalah tersebut, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembelajaran yang diselenggarakan selama pelaksanaan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya ?
2. Apa hasil yang diperoleh peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya ?
3. Bagaimana dampak yang diperoleh oleh peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya ?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran yang diselenggarakan selama pelaksanaan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dampak yang diperoleh oleh peserta pelatihihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan program PKM bidang Tata Kecantikan Rambut tahun 2013/2014 di UPTD SKB Kab. Tasikmalaya.

E. Manfaat

1. Praktisi

Peneliti dapat memberikan gambaran mengenai Proses Pembelajaran Program Pkm Bidang Tata Rias Kecantikan Rambut Dalam Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha Bagi Warga Belajar Di UPTD SKB Kabupaten Tasimalaya. Bagi Tutor / fasilitator : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran pada program PKM bidang kursus tata kecantikan rambut bagi kemandirian para lulusan untuk berwirausaha di UPTD

SKB Kabupaten Tasikmalaya. Bagi para lulusan program PKM penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tata kecantikan rambut bagi kemandirian para lulusan setelah mengikuti program pembelajaran**.** Sebagai bahan masukan bagi praktisi penyelenggara program PAUDNI bagi masyarakat khususnya program PKM bidang kursus tata kecantikan rambut.

2. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu pendidikan tentang masalah yang berkaitan dengan dampak hasil belajar program pembelajaran tata kecantikan bagi kemandirian warga belajar Berwirausaha di UPTD SKB Kabupaten Tasikmalaya.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini adalah rencana peneliti membagi-bagi pembahasan dalam beberapa bagian, pembagian bahasan berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2014, hlm.23). Bagian pembahasan ini yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur organisasi Skripsi.

BAB II Landasan Teori terdiri dari konsep-konsep dan teori-teori pendukung penelitian ini, diantaranya adalah konsep Kemandirian, Konsep Kewirausahaan, Konsep Pembelajaran, dan Konsep PKM, SKKNI, Kurikulum Nasional.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari Desain penelitian, Partisipan, Pengumpulan Data, Analisis Data, Isu Etik.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas Kondisi Objektif Lokasi dan Subjek Penelitian, Pengolahan Analisis Data, dan Pembahasan Analisis Temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari hasil simpulan yang didapat dari penelitian dan saran yang dapat digunakan oleh para peneliti lain.